

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan tidak efektif melaksanakan kewenangannya dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan karena gedung-gedung Sarang Burung Walet yang ada saat ini banyak yang masih kosong dan pengusaha Sarang Burung Walet banyak yang bukan berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan yang membuat pajak sarang burung walet tidak memenuhi target yang sudah di tentukan Pemerintah Daerah dan mengakibatkan tidak terealisasinya Pendapatan Asli Daerah di sektor Pajak Sarang Burung Walet.

Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Lampung Selatan belum berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah karena tidak memenuhi target, Kendala yang di hadapi adalah Wajib Pajak menutupi hasil usaha pengambilan Sarang Burung Walet, sehingga Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak mendapat data potensi yang sebenarnya dari usaha satu pengambilan Sarang Burung Walet. Serta Wajib Pajak yang memiliki usaha atau pengusaha Sarang Burung Walet sebagian

besar bukan penduduk asli Kabupaten Lampung Selatan melainkan dari pengusaha luar daerah seperti Jakarta, sehingga Wajib Pajak terkait tidak melakukan kewajiban mereka dalam melakukan penyetoran atas pajak terutang Sarang Burung walet. Hal ini yang menyebabkan Target yang di tetapkan Pemerintah setiap tahunnya tidak tercapai dan tidak menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu, kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan sangat Kecil padahal potensinya Sangat besar.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi pihak-pihak terkait demi perbaikan di masa yang akan datang sebagai berikut :

Sebaiknya pemerintah kabupaten lampung selatan lebih cermat dalam penetapan pajak seperti pajak sarang burung walet karena apabila tidak memberikan kontribusi sebaiknya pemerintah daerah tidak membuat peraturan tersebut karena membuat peraturan yang tidak ada kontribusinya bagi pendapatan asli daerah akan sia-sia.